

BAB I

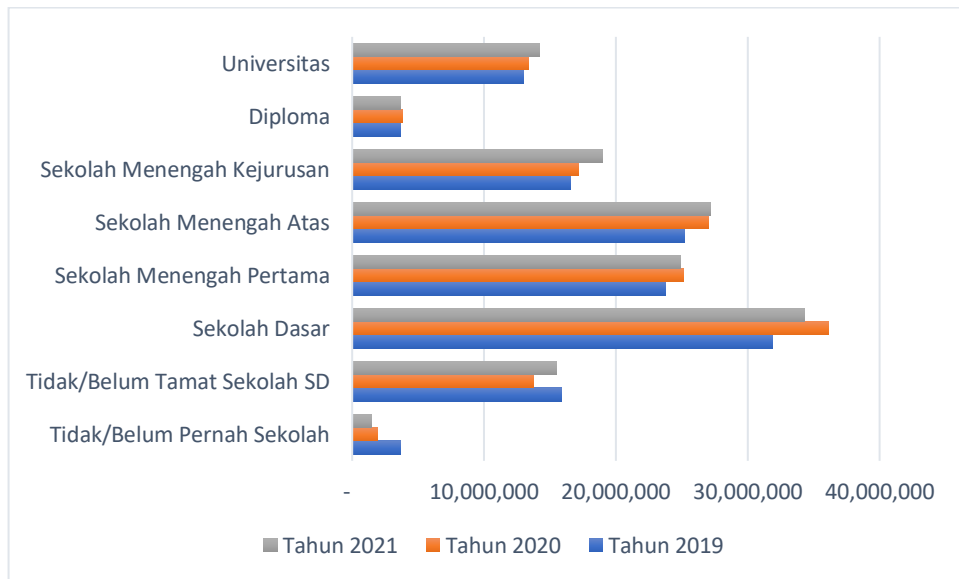
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari unsur tenaga kerja. Ini karena tenaga kerja adalah salah satu komponen produksi, khususnya dalam bidang sumber daya manusia. Mengelola SDA dan membuat produk atau hasil produksi membutuhkan kemampuan atau keahlian tenaga kerja. Untuk dapat menjual ke publik atau di ekspor.

Tenaga kerja ialah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan barang, jasa, dan produk untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan diri mereka sendiri. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang-orang produktif berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan atau masih bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah orang-orang produktif berusia 15-64 tahun yang masih sekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup besar dari tahun ke tahun di bandingkan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2021, ada 139 juta orang yang termasuk angkatan kerja dan 65 juta orang yang termasuk bukan angkatan kerja.



Sumber: *bps.go.id keadaan angkatan kerja di indonesia (diolah)*

Gambar 1.1 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan pada tahun 2019-2021 (Orang)

Dilihat dari Pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja di Indonesia bisa dilihat pada Gambar 1.1 selama tiga tahun terakhir jumlah angkatan kerja mayoritas merupakan lulusan sekolah dasar (SD) mencapai 30 juta orang, selanjutnya di ikuti dengan lulusan SMA. Hal ini menyatakan bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah.

Seseorang yang berusia antara 15 dan 64 tahun dan tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan untuk mendapat pekerjaan disebut pengangguran. Menurut Sugirno (2016) disebut pengangguran ketika seseorang sudah masuk angkatan kerja berusaha untuk mendapat pekerjaan tetapi tidak dapat pekerjaan. Ada tiga jenis pengangguran: pengangguran terselubung, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung merupakan individu yang tidak memiliki pekerjaan

karena alasan tertentu. Pengangguran setengah menganggur merupakan orang yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu. Dan pengangguran terbuka merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran pada Tahun 2019-2021 (Ribu Orang/Tahun)

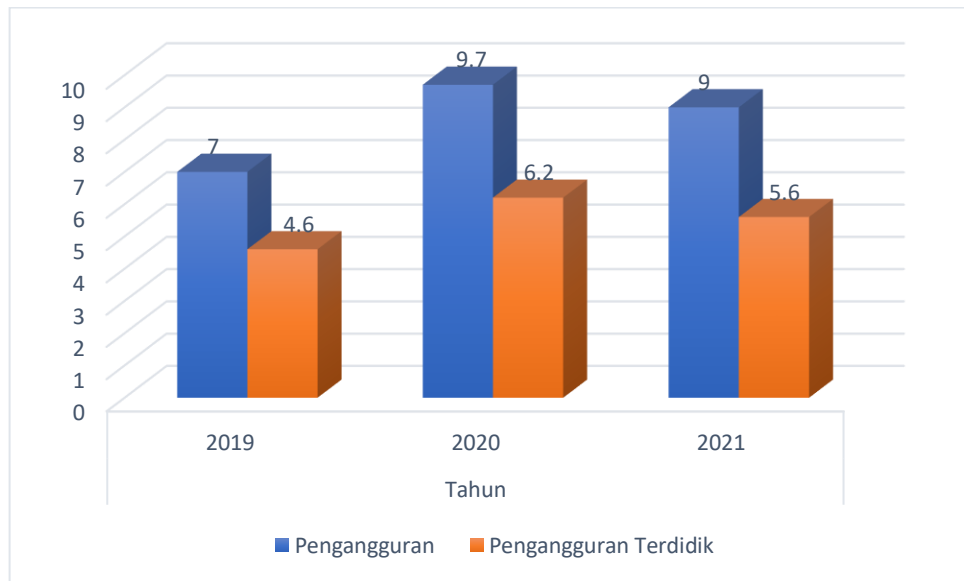
NO	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	146.622	166.600	158.857
2	Sumatera Utara	382.438	507.805	475.156
3	Sumatera Barat	138.459	190.609	179.948
4	Riau	190.143	203.837	145.669
5	Jambi	73.965	93.990	93.754
6	Sumatera Selatan	185.918	238.363	219.199
7	Bengkulu	34.439	43.801	38.745
8	Lampung	171.455	209.568	210.632
9	Bangka Belitung	26.871	38.756	37.176
10	Kepulauan Riau	69.479	117.176	119.595
11	DKI Jakarta	320.901	572.780	439.899
12	Jawa Barat	1.901.498	2.533.076	2.430.147
13	Jawa Tengah	819.355	1.214.342	1.128.223
14	D.I Yogyakarta	69.170	101.846	106.432
15	Jawa Timur	843.754	1.301.145	1.281.395
16	Banten	490.808	661.061	562.310
17	Bali	37.551	144.500	138.669
18	Nusa Tenggara Barat	84.516	113.430	82.495
19	Nusa Tenggara Timur	83.030	121.884	109.928
20	Kalimantan Barat	110.272	151.561	153.307
21	Kalimantan Tengah	56.790	63.309	63.874
22	Kalimantan Selatan	91.730	103.648	109.968
23	Kalimantan Timur	110.574	124.884	126.186
25	Sulawesi Utara	75.485	90.248	85.540
26	Sulawesi Tengah	46.802	59.381	59.371
27	Sulawesi Selatan	200.304	269.817	252.349
28	Sulawesi Tenggara	45.292	61.860	54.134
29	Gorontalo	23.809	25.410	17.959
30	Sulawesi Barat	21.054	23.132	22.208
31	Maluku	54.575	63.489	59.589

NO	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
32	Maluku Utara	27.303	29.997	28.133
33	Papua Barat	28.846	33.501	29.985
34	Papua	67.173	75.658	64.996
INDONESIA		7.030.381	9.750.464	9.085.828

Sumber: bps.go.id (diolah)

Menurut Tabel 1.1 jumlah pengangguran di Indonesia selama tiga tahun terakhir selalu bertambah. Pada tahun 2020 di Indonesia, 9.759.464 orang tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Hal ini merupakan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 2.663.330 orang dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Peningkatan ini merupakan peningkatan terbesar di Indonesia.

Jumlah pengangguran yang meningkat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya peluang pekerjaan, tetapi juga karena lebih banyak orang yang masuk angkatan kerja. Menurut Lipsey, G. Richard, et al. (1992), ada lebih banyak orang yang masuk ke angkatan kerja daripada yang keluar. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa meskipun kesempatan kerja bertambah, pengangguran juga kadang-kadang meningkat.



Sumber: *bps.go.id keadaan angkatan kerja di indonesia (diolah)*

Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Pengangguran dengan Pengangguran Terdidik di Indonesia pada tahun 2019-2021 (Juta Orang)

Selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Indonesia didominasi oleh pengangguran terdidik bisa dilihat di gambar 1.2 pengangguran terdidik hampir mendominasi pengangguran . Salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia ialah tingginya pengangguran dengan Pendidikan tinggi. Sementara Dinas Ketenagakerjaan mendefinisikan pengangguran terdidik sebagai seseorang yang belum atau sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki Pendidikan SLTA ke atas. Mankiw (2003) mengatakan bahwa pengangguran terdidik ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SLTA ke atas.

Pengangguran terdidik di Indonesia menjadi masalah yang menyelimuti dalam perkembangan saat ini. masalah yang muncul ini kerana lulusan terdidik hanya ingin menjadi pencari pekerjaan bukan pencipta pekerjaan. Perkembangan

pengangguran terdidik di Indonesia menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir jumlah pengangguran terdidik di Indonesia mengalami kenaikan. Pengangguran terdidik terbesar yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6.264.174 orang. Dari Tabel 1.2 dibawah bisa dilihat bahwa tingkat pengangguran terdidik tiga tahun terakhir menurut provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021 tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.548.852 orang pada tahun 2020. Sedangkan jumlah pengangguran terdidik terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 16.061 orang. Jumlah pengangguran terdidik tiap provinsi di Indonesia berbeda

Tabel 1.2 Pengangguran Terdidik Pada Tahun 2019-2021 (Ribu Orang/Tahun)

NO	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	105.691	125.884	118.225
2	Sumatera Utara	284.639	373.596	329.855
3	Sumatera Barat	100.403	133.762	114.451
4	Riau	132.988	136.861	115.539
5	Jambi	56.587	63673	60.915
6	Sumatera Selatan	134.747	164.328	160.254
7	Bengkulu	22.248	28.674	25.426
8	Lampung	110.050	121.741	120.207
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.953	24.458	22.673
10	Kepulauan Riau	54.201	94.148	86.228
11	DKI Jakarta	255.421	438.287	348.305
12	Jawa Barat	1.154.148	1.548.852	1.455.997
13	Jawa Tengah	477.928	669.725	572.773
14	D.I Yogyakarta	51.386	79.476	57.666
15	Jawa Timur	565.342	804.864	724.925
16	Banten	319.716	404.817	357.983
17	Bali	31.323	115.938	91.430
18	Nusa Tenggara Barat	58.150	64.194	54.097
19	Nusa Tenggara Timur	64.095	84.155	66.597
20	Kalimantan Barat	61.165	84.667	89.353
21	Kalimantan Tengah	36.312	39.441	35.989

NO	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
22	Kalimantan Selatan	57.202	58.234	67.893
23	Kalimantan Timur	79.981	93.583	92.550
24	Sulawesi Utara	57.678	67.050	61.177
25	Sulawesi Tengah	31.047	41.044	34.062
26	Sulawesi Selatan	145.064	187.329	175.969
27	Sulawesi Tenggara	33.776	42.289	40.504
28	Gorontalo	17.990	17.944	13.770
29	Sulawesi Barat	15.290	14.564	16.061
30	Maluku	47.858	48.911	46.794
31	Maluku Utara	19.476	21.236	19.890
32	Papua Barat	22.271	22.873	19.501
33	Papua	48.461	47.576	40.185
INDONESIA		4.668.587	6.264.174	5.637.244

Sumber: *bps.go.id* keadaan angkatan kerja di Indonesia (diolah)

Pengangguran terdidik menjadi masalah pemerintah pusat hal ini karena pengangguran terdidik mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Pendidikan dan memperluas kesempatan kerja. Seharusnya tenaga kerja terdidik menjadi *human investment* bagi suatu negara.

Hubungan industri dengan pengangguran sangatlah erat. Pertumbuhan industri yang baik ialah dengan bertambahnya jumlah unit usaha dalam suatu industri, maka semakin banyak industri yang ada di suatu wilayah maka semakin besar pula penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi pengangguran terdidik. Menurut jurnal penelitian Abdul Kabar, jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja berkaitan. Perluasan industri memberikan prospek tambahan lapangan kerja, hal ini dengan tersedianya lapangan pekerjaan dapat menurunkan pengangguran terdidik.

Industri dipercaya memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan meningkatkan kesempatan kerja.

Faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik adalah jumlah IMK dan jumlah IBS. Industri ialah suatu entitas bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa. Industri tersebut terletak di suatu gedung atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi khususnya tentang produksi dan struk biaya, dan ada seorang atau lebih orang yang bertanggung jawab atas usaha atau perusahaan tersebut. Terdapat empat kelompok industri antara lain sebagai berikut: industri besar ialah perusahaan industri dengan 100 atau lebih tenaga kerja, industri sedang ialah yang mempekerjakan antara 20 sampai 90 orang tenaga kerja, industri kecil ialah yang mempekerjakan antara 5 sampai 19 orang tenaga kerja, dan yang terakhir industri mikro ialah yang mempekerjakan antara 1 sampai 4 orang tenaga kerja. Menurut data BPS industri merupakan ke 3 terbesar penyerap tenaga kerja di Indonesia, setelah sektor perdagangan besar dan eceran, selanjutnya penyerap tenaga kerja terbesar yaitu sector pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja dan jumlah usaha/perusahaan IMK dan IBS di Indonesia

No	Indikator	Industri Mikro dan Kecil (IMK)			Industri Besar dan Sedang (IBS)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga kerja (juta orang)	9.6	9.6	9.1	6,2	5,9	5.9
2	Jumlah Industri (unit)	4.372.982	4.204.854	4.156.406	30.039	29.331	30.756

Sumber: *bps.go.id*

Dapat dilihat dari Tabel 1.3 bahwa Industri Mikro dan Kecil (IMK) dari tahun 2019-2021 lebih unggul dari segi tenaga maupun jumlah usaha/perusahaan dibanding Industri Besar dan Sedang (IBS). Hal tersebut menunjukkan bahwa industri mikro dan kecil mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan jumlah usaha di bandingkan industri besar dan sedang. Banyaknya Jumlah industri mikro dan kecil mendominasi komposisi jumlah industri di Indonesia.

Semakin banyak industri mikro dan kecil, semakin banyak produk atau nilai keluar yang dihasilkan, sehingga lebih banyak tenaga kerja diperlukan untuk memenuhi tingkat produktivitas industri menurut Hajrah H (2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa munculnya industri ini akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja, yang berarti ada peningkatan penyerapan tenaga kerja akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik

Industrialisasi adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik menurut Arsyad (1992:31). Perusahaan/usaha industri mikro dan kecil memiliki posisi penting untuk menyerap tenaga kerja. Jadi jika jumlah perusahaan/usaha industri mikro dan kecil semakin banyak maka jumlah lapangan kerja bertambah diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran khususnya pengangguran terdidik.

Tabel 1.4 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Pada Tahun 2019-2021 (Ribuan Unit/Tahun)

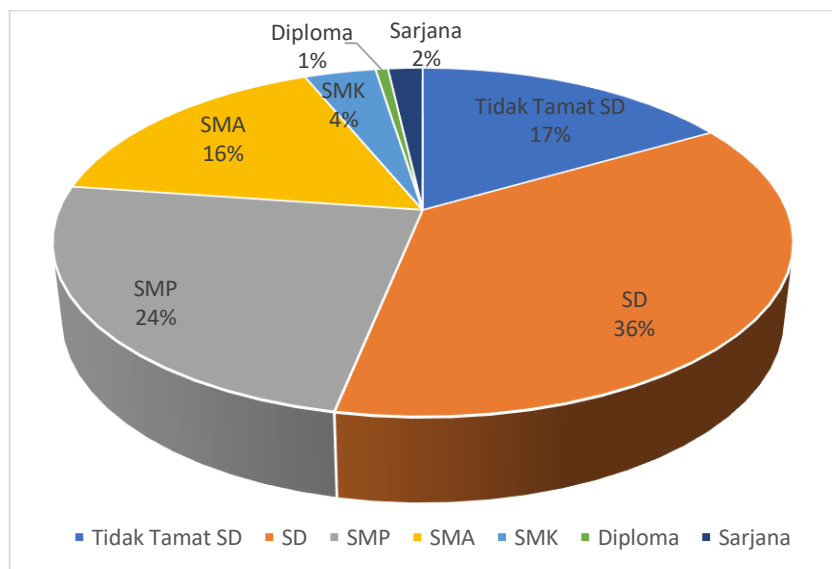
No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	106.918	103.300	113.292
2	Sumatera Utara	127.152	120.163	132.382

No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
3	Sumatera Barat	100.712	94.392	96.633
4	Riau	59.837	50.702	45.795
5	Jambi	28.159	26.085	29.384
6	Sumatera Selatan	80.307	75.569	79.115
7	Bengkulu	21.667	20.433	20.856
8	Lampung	95.041	88.526	84.024
9	Kepulauan Bangka Belitung	22.799	21.557	19.152
10	Kepulauan Riau	17.031	13.779	18.025
11	DKI Jakarta	62.929	59.017	62.108
12	Jawa Barat	629.597	625.943	622.225
13	Jawa Tengah	912.421	898.162	855.488
14	D.I Yogyakarta	146.658	137.499	107.891
15	Jawa Timur	862.450	828.482	762.015
16	Banten	113.139	107.677	103.828
17	Bali	161.120	149.516	148.326
18	Nusa Tenggara Barat	108.481	104.588	106.975
19	Nusa Tenggara Timur	140.163	136.054	156.305
20	Kalimantan Barat	43.024	39.149	40.037
21	Kalimantan Tengah	25.463	23.273	26.007
22	Kalimantan Selatan	57.753	55.633	57.075
23	Kalimantan Timur	32.042	24.644	26.602
24	Sulawesi Utara	37.031	37.111	53.303
25	Sulawesi Tengah	85.379	84.559	88.515
26	Sulawesi Selatan	129.823	126.489	122.880
27	Sulawesi Tenggara	49.435	45.588	54.885
28	Gorontalo	28.715	28.636	25.761
29	Sulawesi Barat	26.295	25.892	23.835
30	Maluku	25.004	22.201	35.364
31	Maluku Utara	14.213	13.583	16.145
32	Papua Barat	6.743	4.558	6.069
33	Papua	15.481	12.094	16.109
Indonesia		4.372.982	4.204.854	4.156.406

Sumber: *bps.go.id profil imk*

Jumlah IMK di Indonesia sebanyak 4.156.406 unit, menurut tabel 1.4 dari survei industri mikro dan kecil tahun 2021. Pulau Jawa memiliki jumlah IMK terbanyak, dengan 60,38 persen dari seluruh usaha mikro dan kecil ditahun 2021.

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat memiliki jumlah IMK terbesar dengan lebih dari 600 ribu. Ini sangat berbeda dengan jumlah Industri Mikro dan kecil di Maluku Utara dan Papua, yang masing-masing memiliki kurang dari 30 ribu usaha.



Sumber: *bps.go.id profil industri mikro dan kecil (diolah)*

Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Pekerja IMK Menurut Provinsi Tahun 2021 (Orang)

Sebagian besar tenaga kerja industri mikro dan kecil, atau 77 persen, adalah lulusan SMP atau tingkat di bawahnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3. IMK menjadi kelompok usaha yang menyerap banyak pekerja berpendidikan rendah. Sebagian besar IMK mempekerjakan lebih banyak pekerja dengan tingkat Pendidikan SMP ke bawah, rata-rata IMK tidak terlalu tergantung kepada tenaga kerja yang terdidik. Hal ini yang menyebabkan tenaga kerja terdidik kurang atau tidak terserap di industri mikro dan kecil dan menyebabkan pengangguran terdidik meningkat.

Selanjutnya jumlah industri besar dan sedang. Jumlah IBS juga mempengaruhi pengangguran. Hal ini bertambahnya jumlah industri akan menambahkan penyediaan lapangan pekerjaan yang diharapkan mampu menyerap jumlah pengangguran yang ada. Semakin banyak industri yang ada di sebuah wilayah, maka semakin rendah tingkat pengangguran di wilayah tersebut (Murcia & Sanchez, 2013).

**Tabel 1.5 Jumlah Industri Besar dan Sedang Pada Tahun 2019-2021
(Unit/Tahun)**

No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	80	82	78
2	Sumatera Utara	1.290	1.185	1.251
3	Sumatera Barat	200	192	195
4	Riau	366	360	368
5	Jambi	176	167	190
6	Sumatera Selatan	286	277	296
7	Bengkulu	61	61	66
8	Lampung	404	385	408
9	Kepulauan Bangka Belitung	97	95	97
10	Kepulauan Riau	571	540	593
11	DKI Jakarta	1.792	1.654	1.636
12	Jawa Barat	8.724	8.215	8.412
13	Jawa Tengah	4.372	4.259	4.294
14	D.I Yogyakarta	509	482	522
15	Jawa Timur	5.878	5.818	6.286
16	Banten	2.927	3.316	3.544
17	Bali	408	371	413
18	Nusa Tenggara Barat	180	170	216
19	Nusa Tenggara Timur	39	35	78
20	Kalimantan Barat	196	202	217
21	Kalimantan Tengah	130	141	146
22	Kalimantan Selatan	182	182	214
23	Kalimantan Timur	245	248	245
24	Sulawesi Utara	127	114	114
25	Sulawesi Tengah	84	78	92

No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
26	Sulawesi Selatan	436	419	465
27	Sulawesi Tenggara	97	106	124
28	Gorontalo	33	28	31
29	Sulawesi Barat	23	23	26
30	Maluku	30	31	37
31	Maluku Utara	14	14	17
32	Papua Barat	41	38	42
33	Papua	41	43	43
Indonesia		30.039	29.331	30.756

Sumber: bps.go.id

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.5 selama tiga tahun terakhir jumlah IBS di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2021 jumlah IBS sebanyak 30.756 unit, sedangkan tahun 2020 sebanyak 29.331 unit.

Pulau Jawa masih menempati pulau dengan jumlah IBS terbanyak, dengan lebih dari 4.000 unit usaha Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki jumlah IBS terbanyak. Ini sangat berbeda dengan jumlah IBS di Maluku Utara dan Sulawesi Barat, yang masing-masing memiliki kurang dari 200 unit usaha.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik ialah upah minimum. Hal ini karena, biaya produksi perusahaan meningkat sebagai akibat dari peningkatan upah minimum (Nicholson, 2002). Jika input yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan output yang diterimanya, perusahaan tersebut akan mengubah inputnya dengan menurunkan jumlah tenaga kerja atau meningkatkan harga barang yang dijual. Jika harga barang meningkat, maka pembeli barang akan menurun, dan perusahaan akan mengurangi tingkat

produksinya karena output yang diproduksi berkurang, sehingga efek output akan menyebabkan permintaan tenaga kerja dan kesempatan kerja berkurang.

Biaya produksi meningkat akibat dari peningkatan tingkat upah minimum yang ditetapkan, akibatnya, perusahaan harus mengurangi tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Yang dapat berakibat pada tingginya pengangguran terdidik (Solihin, 2014).

Upah minimum ialah standar minimum yang digunakan oleh perusahaan atau pekerja untuk membayar karyawan mereka.. UMP sendiri dibuat berdasarkan peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tujuan pembentukan aturan UMP ialah untuk memastikan bahwa semua pekerja menerima upah atau gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka.

Tabel 1.6 Upah Minimum Provinsi Pada Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	2.916.810	3.165.031	3.165.031
2	Sumatera Utara	2.303.403	2.499.423	2.499.423
3	Sumatera Barat	2.289.220	2.484.041	2.484.041
4	Riau	2.662.026	2.888.564	2.888.564
5	Jambi	2.423.889	2.630.162	2.630.162
6	Sumatera Selatan	2.804.453	3.043.111	3.043.111
7	Bengkulu	2.040.407	2.213.604	2.215.000
8	Lampung	2.241.270	2.432.002	2.432.002
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.976.706	3.230.024	3.230.024
10	Kepulauan Riau	2.769.754	3.005.460	3.005.460
11	DKI Jakarta	3.940.973	4.276.350	4.416.186
12	Jawa Barat	1.668.373	1.810.351	1.810.351
13	Jawa Tengah	1.605.396	1.742.015	1.798.979
14	D.I Yogyakarta	1.570.923	1.704.608	1.765.000
15	Jawa Timur	1.630.059	1.768.777	1.868.777

No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
16	Banten	2.267.990	2.460.997	2.460.997
17	Bali	2.297.969	2.494.000	2.494.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.012.610	2.183.883	2.183.883
19	Nusa Tenggara Timur	1.795.000	1.950.000	1.950.000
20	Kalimantan Barat	2.211.500	2.399.699	2.399.699
21	Kalimantan Tengah	2.663.435	2.903.145	2.903.145
22	Kalimantan Selatan	2.651.782	2.877.449	2.877.449
23	Kalimantan Timur	2.747.561	2.981.379	2.981.379
24	Sulawesi Utara	3.051.076	3.310.723	3.310.723
25	Sulawesi Tengah	2.123.040	2.303.711	2.303.711
26	Sulawesi Selatan	2.860.382	3.103.800	3.165.876
27	Sulawesi Tenggara	2.351.870	2.552.015	2.552.015
28	Gorontalo	2.384.020	2.788.826	2.788.826
39	Sulawesi Barat	2.381.000	2.678.863	2.678.863
30	Maluku	2.400.664	2.604.961	2.604.961
31	Maluku Utara	2.508.091	2.721.530	2.721.530
32	Papua Barat	2.934.500	3.134.600	3.134.600
33	Papua	3.240.900	3.516.700	3.516.700

Sumber: *bps.go.id upah minimum regional/provinsi*

Menurut Badan Pusat Statistika rata-rata UMP di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan. Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia yang pertama yaitu di Provinsi DKI Jakarta dengan UMP tahun 2021 mencapai Rp 4.416.186 . Selanjutnya UMP tertinggi yaitu di Provinsi Papua mencapai Rp 3.516.700 pada tahun 2021. UMP tertinggi selanjutnya yaitu di Provinsi Sulawesi Utara yaitu mencapai Rp 3.310.723 pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan pendapat Solihin bahwa jika tingkat upah minimum yang ditetapkan meningkat, biaya produksi akan meningkat. Akibatnya, untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan mereka. yang berarti pengangguran terdidik akan meningkat.

Pengangguran terdidik juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ditunjukkan oleh hukum okun (Mankiw 2000: 240). Hukum okun menjelaskan bahwa hubungan antara pengangguran dan output memiliki efek empiris. Jumlah pekerja yang digunakan mempengaruhi output yang dihasilkan. Kondisi ini dapat membuat permintaan tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak pekerja karena output yang dihasilkan sebanding dengan jumlah pekerja yang digunakan. Aktivitas ekonomi akan bergairah saat pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi cenderung meningkat. sehingga, akan ada lebih banyak lapangan pekerja yang dapat diciptakan (Suartha dan Majana 2017)

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021 (Persen)

NO	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	4,14	-0,37	2,79
2	Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61
3	Sumatera Barat	5,01	-1,61	3,29
4	Riau	2,81	-1,13	3,36
5	Jambi	4,35	-0,51	3,69
6	Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58
7	Bengkulu	4,94	-0,02	3,27
8	Lampung	5,26	-1,66	2,77
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,32	-2,29	5,05
10	Kepulauan Riau	4,83	-3,8	3,43
11	DKI Jakarta	5,82	-2,39	3,56
12	Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74
13	Jawa Tengah	5,36	-2,65	3,33
14	D.I Yogyakarta	6,59	-2,67	5,58
15	Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56
16	Banten	5,26	-3,39	4,49
17	Bali	5,6	-9,34	-2,46
18	Nusa Tenggara Barat	3,9	-0,62	2,3
19	Nusa Tenggara Timur	5,25	-0,84	2,52

NO	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
20	Kalimantan Barat	5,09	-1,82	4,8
21	Kalimantan Tengah	6,12	-1,41	3,59
22	Kalimantan Selatan	4,09	-1,82	3,48
23	Kalimantan Timur	4,7	-2,9	2,55
24	Sulawesi Utara	5,65	-0,99	4,16
25	Sulawesi Tengah	8,83	4,86	11,7
26	Sulawesi Selatan	6,91	-0,71	4,64
27	Sulawesi Tenggara	6,5	-0,65	4,1
28	Gorontalo	6,4	-0,02	2,41
29	Sulawesi Barat	5,56	-2,34	2,57
30	Maluku	5,41	-0,91	3,05
31	Maluku Utara	6,25	5,39	16,79
32	Papua Barat	2,66	-0,76	-0,51
33	Papua	-15,74	2,39	15,16
	Indonesia	5,02	-2,07	3,7

Sumber: bps.go.id

Laju pertumbuhan ekonomi pada tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis hal ini karena covid-19. Tetapi pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan kembali. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu berada di provinsi Maluku Utara yaitu mencapai 16,79 % pada tahun 2021, selanjutnya di ikuti oleh Provinsi Papua yaitu mencapai 15,16%. Laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu di Provinsi Bali yaitu mencapai -2,46% pada tahun 2021.

Selain itu, investasi juga mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik. diasumsikan bahwa ketika nilai investasi meningkat, maka total nilai tambah barang dan jasa di semua unit ekonomi wilayah meningkat. Peningkatan kualitas barang dan jasa meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga pengangguran akan berkurang. Menurut Sukirno (2004), investasi ialah pengeluaran yang dilakukan

oleh penanam modal atau perusahaan atas pembelian barang modal dan sarana produksi atau kemampuan untuk menambah jangkauan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Seiring dengan peningkatan investasi, ada kemungkinan lebih besar bahwa jumlah pekerja yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, yang berarti lebih banyak lapangan pekerjaan yang akan tercipta

Tabel 1.8 Investasi Asing Pada Tahun 2019-2021 (Juta US\$)

No	Nama Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	137,5	51,1	203,3
2	Sumatera Utara	379,5	974,8	580,4
3	Sumatera Barat	157,1	125,6	67
4	Riau	1.034	1.078	1.921,4
5	Jambi	54,6	27	50,9
6	Sumatera Selatan	736,5	1.543,9	1.259,7
7	Bengkulu	144,8	192,3	23,7
8	Lampung	155,2	498,4	173,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	88,7	48,4	44,7
10	Kepulauan Riau	1.363,4	1.649,4	1.043,7
11	DKI Jakarta	4.123	3.613,3	3.330,6
12	Jawa Barat	5.881	4.793,7	5.217,7
13	Jawa Tengah	2.723,2	1.363,6	1.465,9
14	D.I Yogyakarta	14,6	9,7	21,8
15	Jawa Timur	866,3	1.575,5	1.849,2
16	Banten	186,2	2.143,6	2.190
17	Bali	426	293,3	452
18	Nusa Tenggara Barat	270,7	302,1	244,2
19	Nusa Tenggara Timur	126,8	81,3	79
20	Kalimantan Barat	532,3	759,3	463,4
21	Kalimantan Tengah	283,5	177,6	162,5
22	Kalimantan Selatan	372,9	240,8	117,2
23	Kalimantan Timur	861	378	745,2
24	Sulawesi Utara	220,5	155,7	169,1
25	Sulawesi Tengah	1805	1779	2.718,1

26	Sulawesi Selatan	302,6	236,1	310
27	Sulawesi Tenggara	987,7	1.268,6	1.6165
28	Gorontalo	171,3	67,6	78
29	Sulawesi Barat	10,1	6,5	5,9
30	Maluku	33	176,7	13,3
31	Maluku Utara	1.008,5	2409	2.819,9
32	Papua Barat	46,2	10,6	32,5
33	Papua	941	567,7	1.489,1
Indonesia		28.208,4	28.666,6	31.093,1

Sumber: bps.go.id

Pada tiga tahun terakhir investasi asing di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 investasi asing mencapai 31.093,1 juta US\$. Provinsi Penerima investasi asing terbesar yaitu di Provinsi Jawa Barat sebesar 5.217,7 juta US\$ pada tahun 2021, selanjutnya di ikuti oleh provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3.330,6 juta US\$. Sedangkan provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi paling sedikit menerima investasi asing yaitu sebesar 5,9 juta US\$.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Indonesia, yang mana tingkat pengangguran terdidik di Indonesia relatif tinggi. Dimana jumlah perusahaan industri merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak ke tiga, tetapi tingkat pengangguran terdidik masih tinggi, dimana jumlah IMK mengalami peningkatan sedangkan jumlah IBS mengalami penurunan, selain itu di dalam penelitian ini dilihat bagaimana pengaruh variabel upah minimum provinsi, laju pertumbuhan ekonomi, investasi asing terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka penulis mengambil judul penelitian

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terdidik Pada Setiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat dan dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pengangguran terdidik, jumlah industri mikro dan kecil, jumlah industri besar dan sedang, upah minimum provinsi, laju pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2013-2021?
2. Bagaimana pengaruh jumlah industri mikro dan kecil, jumlah industri besar dan sedang, upah minimum provinsi, laju pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing terhadap tingkat pengangguran terdidik pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2013-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran terdidik, jumlah industri mikro dan kecil, jumlah industri besar dan sedang, upah minimum provinsi, laju pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2013-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri mikro dan kecil, jumlah industri besar dan sedang, upah minimum provinsi, laju pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing terhadap tingkat pengangguran terdidik pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2013-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Selain itu, dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan inspirasi baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran ada setiap provinsi di Indonesia.